

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Haris Semendawai, dkk, 2017, *Memahami Whistleblower, Cet. I, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*: Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Edisi Cet. 4* , Kencana: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi Edisi Cet. I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana: Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia: Bandung.
- Consuelo G Sevilla dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, 2009, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Jakarta: Publikasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Djoko Sarwoko, 2011, *Reward Bagi “Whistleblower “ (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Rakernas Mahkamah Agung, Tangerang Selatan, Jakarta.*
- Eddy O.S, Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator*, dalam Perspektif Hukum, Penaku: Jakarta.
- Floriano C. Roa, 2007, *Business Ethics and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition: Manila.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- H.R. Abdussalam Sik, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jilid 2*, Restu Agung: Jakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni : Bandung.
- Luthfi J Kurniawan, 2003, *Menyingkap korupsi di daerah*, Surabaya: YPSDI.
- Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Governminyboard: Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Moh Yamin, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- , Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, Memahami *whistleblower*, Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Wiyono, 1982, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saldi Isra, 2005, *Kata Pengantar: Saksi Yang Bungkam*, Cetakan Pertama Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, 1999, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta LP3ES.
- Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal dan Tesis

Aria Zurnetti dan Nani Mulyati, 2022, *Law Enforcement Model of Village Fund Corruption Through Adat Criminal Law Approach and Local Wisdom in West Sumatera, Nagari Law Review*, 5, (2). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Elwi Danil, 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia, Administrative Law & Governance Journal*. 3 (1), Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum. 19 (3), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Gunawan, Yopi, 2019, *Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana*

Korupsi Di Indonesia, Law Review, 18 (3), Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang.

Habib Sulton Asnawi, 2013, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum, 2 (2), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Jakarta: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, 2010, *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Demokrasi, 9 (1), Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Iza Rumesten, 2014, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (2). Universitas Jenderal Soedirman.

Jupri, 2019, *Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 11 (1), Universitas Kristen Maranatha.

Maidin Gultom, 2006, *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia*, 24 (2), Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian Semarang : IAIN Walisongo

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia*, Jurnal Perlindungan, 4 (1), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.

D. Sumber Lain

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2020, *Tiga Pilar Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada Minggu 23 Juni 2024
<https://www.bpkp.go.id/berita/read/23558/4585/-Tiga-Pilar-Strategi-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Korupsi#:~:text=Kali%20ini%20acara%20yang%20dipandu,yaitu%20edukatif%2C%20preventif%2C%20represif.>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Whistleblower's System Menuju tata kelola yang bersih*, Diakses pada: Kamis 20 Juni 2024, <https://wbs.bpkp.go.id/>

- Djoko Sarwoko, 2011, *Reward Bagi “Whistleblower“ (Pelapor Tindak Pidana) Dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku Yang Bekerjasama) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20pidana%20khusus%20-%20djoko%20sarwoko.pdf>
- Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Saksi dan Pelapor Mafia Peradilan Sulit dapat Perlindungan*. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/152> Diakses Pada Minggu 15 Januari 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2023, *Catatan Perubahan Strategis Mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Demi Keadilan Hukum*, <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clwp3k8e800071ufaswtp5c5o> Diakses Selasa 12 Agustus 2024
- Komjen Ari Dono Sukmanto, 2017, *LPSK dan Polri Perpanjang MoU Perlindungan Saksi dan Korban*, Diakses pada 3 juni 2024 <https://infopublik.id/read/238767/lpsk-dan-polri-perpanjang-mou-p-erlindungan-saksi-dan-korban.html>
- The United Nations Secretariat, 1980, *Crime Trends and Crime Prevention Strategies: Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Department of Economic and Social Affairs. https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf Diakses Minggu 14 Januari 2024
- Transparency International Indonesia, 2017, *Pedoman Whistleblowing System dan Justice Collaborator* <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Pedoman-Whistle-Blowing-System-dan-Justice-Collaborator.pdf> Diakses: Minggu 14 Januari 2024
- Transparency International Indonesia, 2023, *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, Diakses: Minggu 14 Januari 2024.
- The United Nations Secretariat, 1980, *Crime Trends and Crime Prevention Strategies: Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Department of Economic and Social Affairs. https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf Diakses Minggu 14 Januari 2024